

Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori *Attitudinal Factor*

Kristoforus Bagas Romualdi & Saefur Rochmat
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: kristoforusbagas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji potensi reunifikasi Tiongkok terhadap Taiwan yang terus diperjuangkan hingga era pemerintahan Xi Jinping. Pihak Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan reunifikasi, salah satunya dengan menawarkan model "Satu Negara Dua Sistem" yang akan menjadikan Taiwan sebagai bagian provinsi Tiongkok yang mempunyai status otonomi tinggi. Namun, Taiwan masih menolak ajakan reunifikasi dari Tiongkok. Menggunakan pendekatan teori faktor integrasi, yakni *Attitudinal Factor* dari Michael Haas, peneliti menemukan bahwa potensi reunifikasi akan sulit terwujud dalam waktu dekat dikarenakan perbedaan ideologi, kecurigaan Taiwan terhadap komitmen Tiongkok, menguatnya identitas Taiwan, dan adanya campur tangan Amerika Serikat. Tiongkok perlu mengubah pendekatan jika ingin merealisasikan reunifikasi dengan menghindari metode ancaman militer dan berkomitmen tinggi menghormati otonomi daerah-daerah reunifikasi sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dari Taiwan.

Kata kunci: Reunifikasi, Tiongkok, Taiwan

ABSTRACT

This study attempts to examine the potential of China's reunification of Taiwan, which has been fought for up until the time of Xi Jinping. The Chinese side has made various efforts to achieve unification, one of which is proposing the "one country, two systems" model that would make Taiwan part of a Chinese province with the high autonomy. However, Taiwan still refused the invitation to reunify China. Using an approach from integrative factor theory, specifically Michael Haas's attitudinal factor, the researchers found that the potential for reunification will be difficult to materialize in the near future due to differences in ideology, Taiwan's distrust of China's involvement, Taiwan's strengthening of identity, and US intervention. China must change its approach if it is to achieve reunification by avoiding methods of military intimidation and strongly committed to respecting the autonomy of the reunified regions to gain complete trust all of Taiwan.

Keywords: Reunification, Chinese, Taiwan

PENDAHULUAN

Tiongkok dan Taiwan merupakan dua negara yang sebenarnya mempunyai kedekatan secara etnis, historis dan geografis. Namun, kedekatan tiga unsur tersebut tidak berbanding lurus dengan relasi politik antar dua negara yang terjalin (Mubah, 2014). Tiongkok dan Taiwan selama puluhan tahun telah terlibat dalam ketegangan diplomatik politik yang belum juga selesai hingga saat ini. Konflik yang sudah berlangsung lama tersebut diawali dari jatuhnya pemerintahan berbasis republik di daratan China (1912– 1949) akibat kejadian perang saudara yang merepresentasikan perpecahan ideologi antara Republik China yang berhaluan

nasionalis dengan Partai Komunis Tiongkok. Pertempuran dalam skala penuh yang sempat terhenti pada tahun 1937, berlanjut kembali pada tahun 1946 atau setahun setelah dua kelompok tersebut bersatu menghadapi pendudukan Jepang. Tiga tahun kemudian atau tahun 1949 terjadi gencatan pertempuran militer besar. Sejak saat itu, Republik Rakyat Tiongkok yang berideologi komunis mengendalikan Tiongkok daratan (termasuk Hainan) sementara kelompok nasionalis dari Republik China pergi dan menetap di daerah yang saat ini dikenal sebagai Taiwan (Li, 2012).

Taiwan dalam perjalanannya tumbuh menjadi wilayah mandiri yang mengklaim dirinya terpisah dengan Tiongkok meskipun mayoritas masyarakat mereka sebenarnya berasal dari satu etnis besar yang sama. Namun, klaim Taiwan terkait kedudukannya sebagai negara yang berbeda dengan Tiongkok terus dipertanyakan oleh banyak pihak. Hingga saat ini, banyak negara yang belum memberikan pengakuan terhadap Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan organisasi internasional yang mewadahi kurang lebih 193 negara di dunia tidak mengakui keberadaan Taiwan sebagai anggotanya. Status Taiwan yang demikian membuat banyak negara hanya melakukan hubungan kerja sama dalam bidang perekonomian dan ketenagakerjaan dengan Taiwan, namun tidak di bidang diplomatik, termasuk Indonesia (Leprilian, 2016).

Kesulitan Taiwan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain disebabkan oleh Tiongkok yang selalu menggunakan prinsip “*One China Policy*”. Prinsip “*One China Policy*” atau prinsip satu China ini menjadi landasan bagi Tiongkok untuk menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari provinsinya yang tak terpisahkan seperti Hongkong atau Makau. Negara-negara di dunia yang menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan Tiongkok diwajibkan untuk menerima konsep dalam *One China Policy* dan mengakui kedaulatan Tiongkok atas wilayah Taiwan serta menyatakan Tiongkok sebagai wakil dari pemerintahan China yang sah di kancah internasional. Dengan kata lain, dalam *One China Policy* ini, negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut dan hanya memilih satu pemerintahan saja apabila ingin tetap bekerja sama dengan Tiongkok. Kondisi ini tentu saja membuat Taiwan semakin terkucilkan dalam pergaulan dunia internasional, khususnya dalam upaya untuk membangun hubungan diplomatik dan mencari pengakuan internasional (Mahardika & Darmawan, 2020).

Taiwan yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat pada dasarnya tidak setuju dengan prinsip *One China Policy* karena dianggap ambigu serta membingungkan.

Taiwan sangat ingin diakui sebagai suatu wilayah berdaulat yang mempunyai etnis tersendiri yang berbeda sama sekali dengan Tiongkok. Di samping itu, Taiwan juga berharap bisa mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan politik serta mendapat pengakuan dari masyarakat internasional sehingga dapat menjadi anggota penuh PBB. Perbedaan ideologis juga menjadi pertimbangan Taiwan di mana dalam beberapa tahun belakangan, Taiwan merasa sudah mencapai sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Mayoritas penduduk Taiwan juga tidak menginginkan masuk ke dalam sistem ideologi komunis Tiongkok yang dinilai represif dan diktator.

Reaksi penolakan yang ditunjukkan oleh Taiwan tak membuat Tiongkok bergeming. Kebijakan *One China Policy* masih terus dipertahankan sampai pada masa pemerintahan Xi Jinping (Ahzani, 2021). Xi Jinping pun menegaskan soal *One China Policy* tersebut dengan menyuarakan reunifikasi. Pada pidatonya di hari Peringatan Revolusi 1911 tahun 2021, ia berjanji akan mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan secara damai dan tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan (Merdeka.com, 2021). Merespon pidato tersebut, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen menegaskan akan terus mempertahankan sistem demokrasinya dan wilayah yang ia pimpin tidak akan tunduk pada tekanan (Okezone.com, 2021).

Sejak dilantik menjadi presiden, Tsai Ing-Wen memang mempunyai tekad kuat untuk memerdekakan Taiwan dari Tiongkok. Merespon sikap Taiwan, Xi Jinping kemudian meningkatkan pengawasan dan tekanan dengan tujuan membatasi kemampuan Tsai dalam menjalankan roda pemerintahan (Dewi & Karina, 2019). Melihat dinamika tersebut, maka tulisan ini bermaksud untuk menelaah potensi reunifikasi Tiongkok terhadap Taiwan dengan meninjau *Attitudinal Factor* dua wilayah tersebut.

KERANGKA ANALISIS

Reunifikasi merupakan salah satu bentuk integrasi berupa penyatuan kembali dua negara atau lebih menjadi satu negara induk yang sebelumnya terpecah karena peristiwa sejarah (Wikipedia.com). Sebelum isu dengan Taiwan memanas, Tiongkok telah berhasil melakukan reunifikasi dengan Hongkong dan Makau. Reunifikasi tersebut dapat terjadi dengan Tiongkok memberikan fasilitas berupa otonomi khusus terhadap Hongkong dan Makau sehingga dua daerah tersebut berkedudukan sebagai daerah istimewa dalam wadah *Special Administrative Regions* (Syahbuddin, 2019). Dalam konteks upaya integrasi Taiwan oleh Tiongkok, ditawarkan juga sistem yang sama. Pada bunyi salah satu dari sembilan poin program Inisiatif Beijing tahun 1981, disebutkan jika Taiwan berhasil diintegrasikan, maka

Tiongkok akan memberikan otonomi tinggi kepada Taiwan sebagai daerah administrasi khusus dan dapat membentuk angkatan bersenjata. Selain itu, Tiongkok juga tidak akan melakukan intervensi terhadap urusan lokal Taiwan (Haryadi, 2008).

Berkaitan dengan potensi keberhasilan integrasi, peneliti merujuk pada teori dari Michael Haas yang menjelaskan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi keberhasilan penyatuan masyarakat atau negara yang berbeda menjadi satu, yaitu *attitudinal factor* dan *material conditions*. *Attitudinal Factor* adalah faktor sikap yang berarti proses penyatuan dapat direalisasikan apabila elit politik dan masyarakat dari dua atau lebih wilayah memiliki opini atau sikap yang sama untuk mendukung terwujudnya integrasi. Sedangkan *Material Conditions*, berarti integrasi baru akan terjadi saat kedua pihak atau lebih terlibat kontak langsung antar satu sama lain, misalnya melalui hubungan kerja sama pada bidang perdagangan, dan lain sebagainya (Haas, 1984).

Pada konteks *Attitudinal Factor*, baik elit politik maupun publik Tiongkok setuju dengan upaya penyatuan wilayah Taiwan sebagai bagian dari provinsi yang mempunyai sifat otonom. Namun, Taiwan tidak memiliki opini atau sikap yang sama dengan Tiongkok terkait integrasi tersebut. Baik elit politik dan publik Taiwan tidak menginginkan adanya penyatuan dengan Tiongkok dikarenakan perbedaan ideologi politik, yaitu Tiongkok menganut paham komunis dan Taiwan menganut demokrasi. Bagi Taiwan, ideologi demokrasi yang dianut tidak dapat berdiri di bawah pemerintah Komunis yang dianggap otoriter (Wong, 2019). Sementara secara *Material Conditions*, Tiongkok dan Taiwan hingga saat ini menjalin komunikasi melalui kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan studi literatur. Penelitian deskriptif adalah sistem penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini, termasuk yang sudah terjadi di masa lalu (Sukmadinata, 2007). Menurut John W. Best, penelitian deskriptif dilaksanakan tanpa menciptakan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel. Semua kegiatan dan keadaan dibiarkan berjalan sesuai apa adanya. Fokus dari keseluruhan penelitian deskriptif adalah untuk menemukan makna (Sukmadinata, 2007). Sementara studi literatur adalah aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mengolah berbagai macam literasi

yang relevan dengan topik penelitian, mulai dari berita, buku, hingga jurnal sehingga mendapatkan gambaran atas fenomena yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan serta menganalisis fenomena tersebut.

PEMBAHASAN

Upaya Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan

Perang saudara China antara pihak Komunis Tiongkok (Gongchandang) dengan pihak Nasionalis (Kuomintang) pada tahun 1945-1949 berakhir dengan kemenangan pihak komunis. Sementara Partai Kuomintang yang menderita kekalahan, di bawah pimpinan Chiang Kai-Shek yang beraliran nasionalis membentuk negara sendiri di wilayah yang sekarang disebut Taiwan (Dewi & Karina, 2019). Akibatnya muncul dua pemerintahan China yang menguasai wilayah yang berbeda, yaitu Republik China di Taiwan, dan Republik Rakyat China atau sekarang dikenal juga dengan nama Tiongkok di China daratan.

Tiongkok dan Taiwan kemudian terlibat dalam pusaran konflik politik di mana dua negara tersebut saling mengklaim kedaulatannya masing masing sebagai satu-satunya pemerintah yang layak dan legal untuk mewakili masyarakat China. Bahkan, di masa lalu, sebelum tahun 1971, pemerintah Taiwan yang sempat mewakili China dalam urusan internasional juga menganut kebijakan satu China dan mengklaim kedaulatan atas seluruh China, atau China dan Taiwan, dengan mengatakan bahwa pemerintahan Tiongkok ilegal dan tidak sah (Copper, 2009).

Tiongkok berusaha untuk mendapatkan legitimasi dukungan internasional dengan tujuan menggugurkan posisi Taiwan di komunitas internasional. Pasca memudarnya persoalan Perang Korea, Tiongkok mulai menjalin relasi diplomatik dengan negara-negara non komunis sehingga membuat Taiwan secara bertahap kehilangan dukungan untuk terus mewakili masyarakat China di mata internasional (Copper, 2009, p. 219). Usaha Tiongkok dalam membangun hubungan diplomatik dengan banyak negara mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1971, Tiongkok secara bertahap mulai mendapatkan kedaulatan untuk mewakili China di kancah internasional. Hal tersebut diawali dengan munculnya Resolusi PBB dengan nomor 2758 tanggal 25 Oktober 1971 yang isinya menyetujui pengembalian semua hak Tiongkok dan pengakuan bahwa Tiongkok merupakan satu-satunya wakil China yang sah di PBB. Resolusi tersebut juga menyebabkan perwakilan Taiwan dikeluarkan dari kursinya di PBB (Wonoadi, 2013).

Taiwan menolak hasil dari Resolusi PBB Nomor 2758 tahun 1971 dan terus terlibat dalam hubungan yang panas dengan Tiongkok. Sementara Tiongkok, di samping terus mempromosikan One China Policy, juga semakin gencar untuk merealisasikan upaya reunifikasi dengan Taiwan yang sebenarnya sudah disuarakan sejak masa Mao Zedong. Pada tahun 1981, Tiongkok menunjukkan keseriusan yang lebih besar untuk mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan. Ye Yiajin yang merupakan Ketua dari China's National People Congress (NPC) memperkenalkan sembilan poin sistem reunifikasi secara damai. Garis besar dari sembilan poin yang dikenal dengan Inisiatif Beijing tersebut adalah Taiwan akan mendapatkan otonomi tinggi sebagai daerah administrasi khusus dan Taiwan dapat membentuk angkatan bersenjatanya.

Tiongkok juga menjamin sistem sosial, ekonomi, cara hidup masyarakat dan hubungan ekonomi dan budaya kawasan Taiwan dengan negara-negara asing juga tidak akan berubah. Harta milik pribadi, rumah, tanah, kepemilikan perusahaan, hak waris yang sah dan penanaman modal asing tidak akan dilanggar (Haryadi, 2008). Agar dapat mengakomodasi poin reunifikasi terkait pemberian otonomi tinggi, pada bulan Desember 1982, sesi kelima Kongres Rakyat Nasional mengesahkan Konstitusi Republik Rakyat China. Di dalamnya ada pasal 31 yang menetapkan bahwa negara dapat membentuk wilayah administrasi khusus jika perlu dan sistem yang diadopsi di wilayah ini dapat diputuskan. Diksi "mendirikan daerah administrasi khusus" dalam pasal ini sebenarnya mengacu pada pelaksanaan kebijakan "Satu negara, dua sistem" (Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 2006).

Tawaran satu negara dengan memberi otonomi tinggi oleh Tiongkok tersebut ditolak oleh Taiwan. Taiwan tetap dengan pendiriannya untuk berdiri sebagai negara merdeka di luar bayang-bayang Tiongkok. Hal tersebut menyebabkan hubungan politik Taiwan dan Tiongkok terus mengalami ketegangan, meskipun dalam beberapa kesempatan kedua negara tersebut saling bekerja sama dalam bidang perekonomian. Dalam rangka menyelesaikan sengketa, upaya damai antara Tiongkok dan Taiwan kemudian dilaksanakan dan dimulai pada tahun 1992 di Hongkong yang kemudian memunculkan Konsensus 1992.

Dalam perundingan kala itu, Tiongkok diwakili oleh Straits Exchange Foundation (SEF) dan Taiwan yang diwakili oleh Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS). Perundingan pun menghasilkan kesepakatan tentang konsep *One China*, namun Tiongkok maupun Taiwan pasca pertemuan memiliki penafsiran yang justru saling bertentangan terkait konsep tersebut (Lin & Wen-chen, 2016).

Taiwan menganggap bahwa arti dari *One China* dalam Konsensus 1992 adalah '*One China, Two Government*', yakni satu China yang mempunyai dua pemerintahan yang berbeda serta benar-benar terpisah. Sedangkan Tiongkok menganggap kebalikannya, bahwa Taiwan adalah wilayah yang tak terpisahkan dari Tiongkok serta hanya ada satu pemerintahan yang berhak mewakili China di dunia, yaitu Tiongkok itu sendiri. Tiongkok juga mengklaim bukti sejarah, realitas, serta hukum Taiwan Affairs Office of the State Council PRC 2001 menegaskan bahwa konsep *One China* berarti tidak ada negara China lain selain Republik Rakyat Tiongkok (Momma, 2013). Tiongkok kemudian menjadikan Konsensus 1992 sesuai penafsirannya sebagai landasan membangun relasi politik dengan negara-negara lain. Setiap negara yang hendak menjalin kerja sama diplomatik dengan Tiongkok diwajibkan untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara independen.

Konsensus 1992 bisa dikatakan tidak berhasil menyelesaikan persoalan disintegrasi antara Tiongkok dan Taiwan. Dampaknya justru membuat dua negara semakin terlibat dalam hubungan politik yang saling curiga antar satu dan yang lain, ditambah dengan keberadaan Amerika Serikat di belakang Taiwan. Memasuki tahun 2000-an, sikap Taiwan terhadap Tiongkok masih sama, yakni menolak reunifikasi meskipun dalam sektor perekonomian terjadi peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan (*Material Conditions*). Tahun 2020 misalnya, Tiongkok menerima sekitar 44% dari total ekspor yang dilakukan oleh Taiwan.

Angka ini meningkat kurang lebih 12% dari tahun sebelumnya. Sebuah angka yang cukup mengejutkan, karena hampir setengah dari total ekspor Taiwan, pembelinya adalah Tiongkok (Hidriyah, 2021). Namun, hal tersebut nyatanya tidak dapat dijadikan tolak ukur potensi keberhasilan reunifikasi. Faktanya, hubungan politik antara Tiongkok dan Taiwan sampai memasuki tahun 2022 justru semakin memanas. Bahkan ketegangan yang terjadi pada tahun 2021 disebut-sebut sebagai yang terburuk selama 40 tahun terakhir (Hidriyah, 2021).

Attitudinal Factor: Perbedaan Sikap terhadap Potensi Reunifikasi

Usaha Tiongkok untuk melakukan reunifikasi terhadap Taiwan sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Akan tetapi, usaha tersebut hingga memasuki tahun 2022 belum dapat terealisasi dan dua negara tersebut justru terjebak pada hubungan politik yang semakin memanas. Apa yang menyebabkan proses reunifikasi menjadi terhambat? Mencermati teori Haas soal *Attitudinal Factor* pada bagian kerangka analisis tentang cara

mencapai integrasi, maka proses reunifikasi dapat terwujud apabila elit politik dan masyarakat sipil mempunyai opini yang sama untuk mendukung integrasi. Namun, elit politik dan masyarakat sipil yang dimaksud berasal dari kedua belah pihak yang statusnya sedang terpisah. Apabila salah satu pihak menolak, maka dengan sendirinya proses reunifikasi tersebut menjadi terhambat. Pada kasus ini, baik elit politik dan masyarakat Tiongkok mendukung proses reunifikasi. Sementara Taiwan menentang reunifikasi dan tetap pada pendiriannya untuk menjadi wilayah otonom karena perbedaan ideologi politik.

Xi Jinping selaku presiden Tiongkok saat ini menegaskan bahwa perbedaan ideologi antara Tiongkok dan Taiwan bukan permasalahan besar yang dapat menghambat proses reunifikasi. Perbedaan ideologi menurut Tiongkok dapat diatasi dengan mekanisme “Satu China Dua Sistem”, yakni menjadikan Taiwan sebagai daerah administrasi yang mempunyai otonomi tinggi. Jika merujuk kembali pada Inisiatif Beijing, apabila Taiwan menerima usulan reunifikasi maka mereka dapat menjalankan manifestasi ideologi politiknya secara bebas tanpa intervensi, namun di satu sisi Taiwan harus kehilangan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dan otonom. Urusan politik luar negeri akan dan harus dikelola oleh pemerintahan Tiongkok.

Taiwan bukan hanya keberatan dengan hilangnya kedaulatan, namun mereka juga tidak percaya jika Tiongkok akan sungguh-sungguh memberikan kebebasan untuk menjalankan manifestasi ideologi politik Taiwan. Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen, pada tahun 2019 memperlihatkan indikasi keraguannya terhadap komitmen Tiongkok. Saat debat kampanye Pemilu tahun 2019, ia membacakan surat dari seorang pemuda di Hongkong yang isinya meminta masyarakat Taiwan untuk tidak mempercayai komunis Tiongkok (Tempo.co, 2019). Hal yang menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat Hongkong terhadap Tiongkok dapat dilihat ketika muncul isu RUU Ekstradisi yang memungkinkan warga Hongkong dihukum di pengadilan Tiongkok.

Masyarakat di sana kemudian bereaksi melakukan demo besar-besaran karena menilai RUU tersebut dapat mengancam kedaulatan dan menempatkan mereka pada posisi yang tidak menyenangkan di bawah sistem peradilan Tiongkok (Hartati, 2019). Taiwan berkaca dari persoalan masyarakat Hongkong yang merasakan penurunan kondisi demokrasi dan hak asasi manusia yang disertai dengan meningkatnya campur tangan pemerintah Tiongkok dalam urusan lokal (Wangke, 2019). Presiden Tsai Ing-Wen pun menjadikan Hongkong sebagai patokan atau contoh yang menggambarkan kondisi Taiwan apabila menerima iming-iming integrasi dari Tiongkok.

Sikap Tsa Ing-Wen sejatinya juga mencerminkan sikap dari masyarakat Taiwan yang semakin tegas menolak reunifikasi. Jauh sebelumnya, masih ada kelompok masyarakat di sana yang mendukung agar Taiwan berintegrasi dengan Tiongkok karena latar ras yang mayoritas sama. Namun, dukungan sebagian rakyat Taiwan untuk reunifikasi secara bertahap mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin banyaknya rakyat pada tahun 2009 yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Taiwan, berbeda dengan China atau Tiongkok (Blazevic, 2010). Jajak pendapat yang beberapa kali berlangsung di Taiwan juga menunjukkan bahwa mayoritas orang Taiwan menolak mekanisme Satu China Dua Sistem yang diusung oleh Tiongkok (Wong, 2019).

Kaum muda di Taiwan pun menunjukkan sikapnya menolak integrasi yang salah satu penyebabnya akibat intimidasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Masyarakat Taiwan sangat mendukung diadopsinya sistem demokrasi karena masyarakat dapat bebas menyuarakan pendapatnya dan bebas dari tekanan pemerintah. Sehingga, mereka sulit untuk menerima sistem otoriter seperti di Tiongkok, terutama terkait dengan kebijakan yang sifatnya mengintimidasi dan menekan (Dewi & Karina, 2019). Taiwan tidak melihat ada jaminan bagi demokrasinya tetap dapat berdiri tegak dengan otonom jika bersatu dengan Tiongkok mengingat negara berhaluan komunis tersebut justru semakin otoriter di bawah kepemimpinan Xi Jinping.

Taiwan mempunyai keyakinan dan posisi cukup kuat mempertahankan *attitudinal factor* ideologinya karena mereka juga didukung oleh Amerika Serikat yang sudah jelas berhaluan demokratis. Bahkan, hubungan Amerika Serikat dan Taiwan sendiri terbentuk karena kepentingan ideologi, yakni mencegah ekspansi paham komunis menyebar luas di kawasan Asia Pasifik pada masa Perang Dingin (Huang, 2010). Secara tertulis, hubungan antara AS dan Taiwan dalam rangka menanggulangi masalah ancaman Tiongkok terbentuk pertama kali melalui perjanjian Mutual Defence Treaty tahun 1954. Melalui perjanjian tersebut, AS mulai banyak memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Taiwan demi pertahanan dan keamanan dan masa depan pembangunan Taiwan.

Bahkan, setelah Taiwan pada tahun 1955 mampu mandiri secara ekonomi, AS tetap memberikan bantuan militer terhadap Taiwan (Andhika, 2015). Meskipun dalam perjalanan berikutnya, Amerika Serikat secara diplomatik mengakui Tiongkok sebagai pemerintahan yang mewakili masyarakat China dan Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok (Taniputera, 2008). Namun, AS di satu sisi tetap berusaha menjalin kerja sama dengan Taiwan. AS hingga

saat ini juga mengambil peran ganda, yakni menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan di satu sisi berdiri sebagai pelindung Taiwan dari upaya reunifikasi.

Indikasi sikap AS untuk menolak reunifikasi Tiongkok dapat dilihat dari bantuan militer yang diberikan kepada Taiwan. AS dan Taiwan tercatat beberapa kali terlibat dalam kerjasama jual beli persenjataan militer. Pada tahun 2020 misalnya, ketika AS masih dipimpin oleh Presiden Donald Trump, mereka menyetujui proyek penjualan senjata ke Taiwan dengan nilai USD 5,1 miliar, atau sekitar RP 76,5 triliun. Sementara pada masa pemerintahan Joe Biden, AS secara diam-diam mengirim beberapa pasukan militernya ke Taiwan untuk berlatih bersama, yang mencakup personel Angkatan Laut dan Pasukan Operasi Khusus AS (Hidriyah, 2021). Hubungan tersebut memperlihatkan komitmen kerjasama antara AS dan Taiwan yang kuat. Meskipun AS juga mempunyai motif ekonomi atas relasinya dengan Taiwan, ada hal yang juga tidak bisa diabaikan bahwa hubungan kerjasama tersebut dapat terbentuk juga karena ikatan dan kepentingan ideologi.

Keberadaan AS di belakang Taiwan membuat Tiongkok harus sangat berhati-hati, apalagi sampai melakukan invasi militer untuk kepentingan reunifikasi. Hal itu dikarenakan AS melalui Presiden Joe Biden juga sudah menunjukkan komitmennya untuk melindungi sekutunya termasuk Taiwan di wilayah Asia Pasifik. Apabila Tiongkok melakukan invasi militer, maka AS dapat ikut terlibat sehingga akan berdampak pula terhadap perekonomian Tiongkok itu sendiri. Berkaca dari kasus Rusia dan Ukraina, di mana AS dan sekutu banyak menjatuhkan hukuman ekonomi terhadap Rusia, hal serupa juga bisa terjadi kepada Tiongkok. Hal tersebut tentu saja akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Xi Jinping yang juga mempunyai ambisi untuk mendominasi perekonomian global.

Kondisi-kondisi yang sudah diuraikan di atas memperlihatkan potensi reunifikasi Tiongkok atas Taiwan masih sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Tiongkok dan Taiwan belum mempunyai *Attitudinal Factor* yang seirama untuk mewujudkan terjadinya integrasi. Meskipun secara *Material Factor* Taiwan dan Tiongkok mempunyai hubungan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, akan tetapi hal tersebut tidak memberi pengaruh karena pada dasarnya kerjasama bilateral dapat dilaksanakan tanpa harus reunifikasi. Hal yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan ideologi dan penguatan identitas atau jati diri membuat warga Taiwan tidak setuju untuk melakukan reunifikasi. Selain itu, ketidakpercayaan Taiwan terhadap Tiongkok dengan komitmen Satu China Dua Sistem serta campur tangan AS juga menjadi batu sandungan besar terhadap upaya reunifikasi. Apalagi Taiwan dan Tiongkok mempunyai catatan historis yang panjang dalam urusan konflik ini.

Tiongkok mempunyai pekerjaan rumah yang besar apabila memang ingin melakukan reunifikasi terhadap Taiwan. Pemerintah Xi Jinping harus menunjukkan komitmen yang nyata untuk menjamin demokratisasi dan nilai kebebasan yang sudah mengakar di Taiwan. Dua poin tersebut tentunya berseberangan dengan Tiongkok yang komunis serta cenderung membatasi kebebasan warganya. Tindakan provokasi militer seperti awal bulan Oktober 2021, di mana sejumlah pesawat tempur Tiongkok memasuki wilayah udara Taiwan (Hidriyah, 2021) juga hanya akan membuat warga Taiwan semakin yakin bahwa demokrasi dan komunisme memang tidak dapat dipertemukan dalam satu negara.

KESIMPULAN

Selama puluhan tahun, Tiongkok sudah menyuarakan dan mengusahakan agar reunifikasi dengan Taiwan dapat terwujud. Tiongkok yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping pun menunjukkan keinginan kuatnya agar Taiwan dapat segera benar-benar terintegrasi dengan Tiongkok. Potensi reunifikasi dilihat oleh Xi Jinping sebagai hal yang mungkin terjadi meskipun Tiongkok menganut komunisme dan Taiwan menganut demokrasi. Potensi reunifikasi ini dapat dikaji dengan menggunakan teori dari Michael Haas soal faktor pendukung integrasi, yakni *Attitudinal Factor* dan *Material Factor*. Secara *Material Factor*, Tiongkok dan Taiwan mempunyai hubungan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Namun, secara *Attitudinal Factor*, kedua negara tersebut mempunyai sikap yang saling bertolak belakang.

Tiongkok dalam hal ini para elit dan masyarakatnya setuju terhadap upaya reunifikasi. Sementara elit dan masyarakat Taiwan menolak gagasan tersebut. Penolakan itu disebabkan oleh perbedaan ideologi yang sangat mendasar, yakni Tiongkok yang komunis dan cenderung represif sedangkan Taiwan menganut demokrasi dan cenderung terbuka. Ada kekhawatiran bagi masyarakat Taiwan apabila reunifikasi terjadi, Tiongkok tidak akan memegang komitmennya terhadap tawaran Satu China Dua Sistem seperti apa yang menimpa Hongkong. Selain itu, sudah banyak warga Taiwan yang merasa identitas dirinya tidak lagi sama dengan China khas Tiongkok.

Upaya reunifikasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga semakin sulit karena Taiwan mendapat dukungan dari negara adidaya Amerika Serikat. Maka, Tiongkok perlu mengubah pendekatan jika benar-benar ingin merealisasikan reunifikasi Taiwan dengan menunjukkan komitmen nyata terhadap jaminan kebebasan di sana. Apabila Tiongkok lebih memilih

melakukan provokasi dan tekanan ancaman militer, hal tersebut justru membuat potensi reunifikasi menjadi semakin jauh dari harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Copper, J. F. 2009. *Taiwan: Nation-State or Province?* (1 ed.). USA: Westview Press.
- Li, Xiaobing. (Penyunt.). 2012. *China at War: An Encyclopedia*.
- Sukmadinata, N. S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taniputera, I. 2008. *History of China*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Zed, M. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ahzani, W. F. 2021. "Upaya Pemerintahan Tsai Ing-Wen Melawan Tekanan One-China Principle Pada Era Xi Jinping", *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 552-564.
- Andhika, S. R. 2015. "Kepentingan AS Bekerjasama dengan Taiwan dalam Bidang Perdagangan Persenjataan di Era George Walker Bush (2001-2009)", *Jurnal JOM FISIP*, 2(1), 1-14.
- Asiana, L. 2017. "Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus One China Policy", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(1), 20-27.
- Blazevic, J. J. 2010. "The Taiwan Dilemma: China, Japan, and the Strait Dynamic", *Journal of Current Chinese Affairs*, 39(4), 143-173.
- Dewi, I. F., & Dewi, K. U. 2019. "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok", *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168.
- Haas, M. 1984. "Paradigms of Political Integration and Unification: Applications to Korea", *SAGE: Journal of Peace Research*, 21(1), 47-60.
- Haryadi, P. 2008. "Diplomasi China dalam Menerapkan Program Reunifikasi Taiwan", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 4(2), 183.
- Hidriyah, S. 2021. "Konflik China-Taiwan dan Respons Amerika", *Jurnal Info Singkat*, 13(20), 7-12.
- Leprihan, Y. 2016. "Implikasi Kebijakan One China Policy terhadap Keamanan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan Periode Tahun 2010-2014", *Journal of International Relations*, 3(2), 75-83.
- Lin, C.-y., & Lin, W.-c. 2016. "Democracy, Divided National Identity, and Taiwan's", *Taiwan Journal Of Democracy*, 1(2), 69-87.
- Mahardika, M. T., & Darmawan, A. 2020. "Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan", *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 217-237.
- Mubah, A. S. 2014. "Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat", *Jurnal Global dan Strategis*, 8(2), 321-337.
- Syabbuddin. 2019. "Eksistensi Kepentingan Global Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan", *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(2), 70-81.
- Wangke, H. 2019. "Demonstrasi di Hongkong dan Implikasi Internasionalnya", *Jurnal Info Singkat*, 11(18), 7-12.
- Wong, Y. c. 2019. "Independence or Reunification? The Evolving PRC-Taiwan Relations", *Baltic Journal of European Studies*, 9(2), 98-122.
- Hartati, A. Y. 2019. "Demonstrasi Politik Di Hongkong Tahun 2019", *Prosiding Senas POLHI* (hal. 245-254). Semarang: Unhawas.
- Huang, A. C. 2010. "The United States and Taiwan's Defense Transformation", Brookings, 16 Februari [Daring]. Tersedia dalam <https://www.brookings.edu/opinions/the-united-states-and-taiwans-defense-transformation/> [Diakses (15 Mei 2022)].

- Kementerian Luar Negeri Tiongkok. 2006. "Ye Jianying's Nine Principles for the Peaceful Reunification with Taiwan (1981)", 8 Mei [Daring]. Tersedia dalam <https://www.mfa.gov.cn/ce/celv//eng/zt/twwt/t251057.htm> [Diakses (9 Juni 2022)].
- Momma, R. 2013. "Briefing Memo: The Direction of China-Taiwan Relations under the Xi Jinping and Ma Ying-jeou Administrations", The National Institute for Defense Studies News, Maret [Daring]. Tersedia dalam http://www.nids.go.jp/english/publication/briefing/pdf/2013/briefing_e174.pdf [Diakses (9 Juni 2022)].
- Nathania, V. 2021. "Presiden Taiwan Tidak Akan Tunduk pada Tekanan China: Tolak Upaya Reunifikasi", *Okezone.com*, 11 Oktober [Daring]. Tersedia dalam <https://news.okezone.com/read/2021/10/11/18/2484398/presiden-taiwan-tidak-akan-tunduk-pada-tekanan-china-tolak-upaya-reunifikasi> [Diakses (12 Mei 2022)].
- Tempo.co. 2019. "Presiden Taiwan Bacakan Surat dari Hongkong, Pesan Anti China", 30 Desember [Daring]. Tersedia dalam <https://dunia.tempo.co/read/1289197/presiden-taiwan-bacakan-surat-dari-hong-kong-pesan-anti-china/full&view=ok> [Diakses (10 Juni 2022)].
- Wijaya, P. 2021. "Xi Jinping Serukan Reunifikasi dengan Taiwan pada Pidato Peringatan Revolusi", *Merdeka.com*, 10 Oktober [Daring]. Tersedia dalam <https://www.merdeka.com/dunia/xi-jinping-serukan-reunifikasi-dengan-taiwan-pada-pidato-peringatan-revolusi.html> [Diakses (12 Mei 2022)].
- Wikipedia.com. (t.thn.). "Pengertian Reunifikasi", [Daring]. Tersedia dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Reunifikasi#:~:text=Reunifikasi%20adalah%20proses%20penyatuan%20kembali,dengan%20damai%20maupun%20dengan%20peperangan> [Diakses (13 Mei 2022)].
- Wonoadi, G. L. 2013. "Menelisik Kedaulatan Taiwan", Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 14 Maret [Daring]. Tersedia dalam dari <https://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/> [Diakses (9 Juni 2022)].